BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan lokal merupakan salah satu kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terbentuk dari proses migrasi dan pertemuan berbagai kelompok etnis. Dalam konteks tersebut, Pemimpin lokal tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai simpul yang menjaga tatanan sosial, mengatur relasi antar warga, serta mewakili keberadaan legitimasi suatu komunitas di hadapan negara maupun masyarakat sekitarnya.[1]

Dalam masyarakat yang bersifat multietnis, Keberadaan kepemimpinan lokal menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan mengenai siapa yang memperoleh kewenangan untuk memimpin, tetapi juga menyangkut proses terbentuknya legitimasi seorang pemimpin di tengah masyarakat. Selain itu, kepemimpinan lokal turut memberikan pengaruh terhadap pola hubungan, interaksi, dan dinamika yang berkembang di antara kelompok-kelompok etnis yang hidup berdampingan dalam suatu wilayah.[2]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[1] Kartini kartono, *pemimpin dan kepemimpinan: apakah kepemimpinan abnormal itu*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 6.

[2] Abdul Halim, Sosiologi Halim, *Sosiologi Politik etnik : Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura,* (Malang : Intelegensi Media, 2019),

Salah satu fenomena yang melahirkan masyarakat multietnis di Indonesia adalah program transmigrasi. kebijakan transmigrasi merupakan program penting pemerintah Indonesia yang telah dilaksanakan sejak era kolonial hingga pasca kemerdekaan, bertujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, meratakan pembangunan, serta memanfaatkan sumber daya di luar Jawa. Program ini mendorong migrasi penduduk, khususnya etnis Jawa, ke berbagai pulau seperti; Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.[3] Perpindahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga memengaruhi struktur sosial, budaya, serta pola kekuasaan dan kepemimpinan di daerah tujuan.[4] Di berbagai daerah, transmigrasi mengubah desa-desa yang awalnya homogen secara etnis menjadi masyarakat multietnik dengan dinamika hubungan sosial yang lebih kompleks, termasuk potensi integrasi maupun konflik antar kelompok.[5]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam konteks dinamika sosial, transmigrasi dipandang sebagai salah satu faktor yang mampu menggeser struktur sosial tradisional.[6] Kedatangan penduduk baru memunculkan pola-pola interaksi, jaringan

[3]Eni May, "Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa: Studi Kasus di Desa Tongar, Koja dan Desa Baru Pasaman Sumatera Barat" (Laporan Penelitian, Universitas Andalas, Padang, 2006): hlm. 2.

[4]Yoso Nova, "Dampak Transmigrasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan,* Vol. 5, no. 1 (Januari–Juni 2016): hlm. 24.

[5] Abdul Hafid, "Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan," *Jurnal Al-Qalam,* Vol. 22, no. 1 (Juni 2016): hlm. 256–268.

[6] Pierre Spitz, "Transmigrasi di Indonesia: Kasus Lamtoron," *Pembangunan dan Perubahan* Vol. 13, no. 2 (1982): hlm. 249–276.

sosial, dan struktur stratifikasi yang berbeda dari sebelumnya.[7] Pergeseran tersebut seringkali menuntut penyesuaian antara penduduk lokal dan pendatang, baik dalam hal budaya, ekonomi, maupun politik lokal. Di satu sisi, transmigrasi dapat mendorong integrasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.[8] Di sisi lain, ia juga menyimpan potensi konflik dan resistensi, terutama ketika menyangkut perebutan sumber daya, akses terhadap lahan, dan posisi dalam struktur kekuasaan lokal.[9]

Provinsi Sumatera Barat, yang secara kultural dikenal sebagai wilayah adat Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal dan struktur pemerintahan nagari yang khas, turut menjadi salah satu daerah tujuan program kolonisasi tersebut. Program ini telah dirintis sejak masa kolonial, yakni sekitar tahun 1936, ketika sejumlah penduduk asal Jawa Tengah dan Jawa Timur didatangkan untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit Ophir, Kinali.[10] Program kolonisasi ini kemudian berlanjut ke wilayah lain di Sumatera Barat, termasuk ke Kabupaten Pasaman, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang memandang wilayah Pasaman cocok dijadikan lokasi transmigrasi karena kepadatan penduduknya yang relatif rendah serta kondisi alamnya yang sesuai untuk pertanian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

---

[7] Riwanto Tirtosudarmo, *"Program Transmigrasi Indonesia: Dari Ideologi Menuju Realitas,"* dalam *Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia*, ed. Gavin W. Jones dan R. M. Douglas (Singapura: Oxford University Press, 1991), hlm. 123–145.

[8] Peter F. Bell, *The Political Economy of the Indonesian Transmigration Program* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1987), hlm. 91.

[9] Monica O. Lindberg, "Integrasi dan Konflik Permukiman Transmigrasi: Studi Kasus dari Lampung," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 155, no. 3 (1999): hlm. 407–432.

[10] Ashfahrizal, *Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit Ophir dari Onderneming hingga* (Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang, 1996), hlm. 3

Kabupaten Pasaman Barat, khususnya Kecamatan Ranah Batahan, merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini. Secara historis, wilayah ini merupakan bagian dari *rantau* Minangkabau kawasan pinggiran di luar wilayah adat inti *darek* yang sejak lama menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok etnis pendatang.[11] Konsep rantau dalam masyarakat Minangkabau sendiri secara historis erat kaitannya dengan pola migrasi dan pembentukan permukiman baru di luar wilayah nagari asal, yang pada gilirannya turut membentuk pola kepemimpinan dan kelembagaan adat yang beradaptasi dengan konteks setempat.[12] Ranah Batahan, khususnya Nagari Desa Baru, menjadi lokasi yang kaya untuk mengkaji dinamika kepemimpinan lokal dalam masyarakat multietnis karena mempertemukan tiga kelompok etnis dengan latar belakang adat dan sistem sosial yang berbeda, Minangkabau sebagai penduduk asli dengan sistem adat nagari, Mandailing yang berasal dari wilayah Tapanuli bagian selatan, serta Jawa yang datang melalui gelombang kolonisasi dan transmigrasi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gelombang transmigran asal Pulau Jawa pertama kali tiba di Pasaman pada tahun 1951, pada masa pemerintahan Bupati Pasaman AM. Jalaluddin, disusul kemudian oleh migrasi penduduk etnis Mandailing dari Sumatera Utara melalui pelabuhan-pelabuhan di Natal, Batahan, dan Air

[11]Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), hlm. 14

[12]Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, terj. Gusti Asnan dan Akiko Iwata (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),hlm. 45–60.

Bangis.[13] Salah satu kawasan yang menjadi tujuan penempatan transmigran tersebut adalah kawasan yang kemudian dikenal dengan nama Nagari Desa Baru, di Kecamatan Ranah Batahan. Pada rentang tahun 1954–1956, gelombang transmigran asal Jawa secara khusus ditempatkan di kawasan Desa Baru Pasaman Barat, dan pada tahap berikutnya kawasan tersebut bahkan turut menerima kedatangan transmigran keturunan Jawa yang sebelumnya bermukim di Suriname.[14] Peristiwa ini menjadikan Nagari Desa Baru sebagai salah satu kawasan transmigrasi tertua di Sumatera Barat.[15]

Keterangan ini turut dikuatkan oleh sumber independen di luar dokumen monografi nagari: Zaiyardam Zubir, dalam karyanya Radikalisme Kaum Pinggiran, mengutip Majalah Minangkabau No. 1 Tahun ke-5 (1935) yang mencatat bahwa sejak zaman kolonial Belanda, Pasaman Barat telah banyak didatangi transmigran, dan secara spesifik menyebut tahun 1935 sebagai tahun ketika orang Jawa telah sampai di Desa Baru untuk membuka hutan sebagai lahan pertanian.[16] Kesesuaian antara sumber arsip termuan ini dengan kesaksian lisan sejumlah informan generasi pertama transmigran

UIN IMAM BONJOL PADANG

[13]Undri, "Migrasi dan Interaksi antara Etnis di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 4, no. 2 (2018): hlm. 1189–1210.

[14]Eni May, *"Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa: Studi Kasus di Desa Tongar, Koja dan Desa Baru Pasaman Sumatera Barat"* (Laporan Penelitian, Fakultas Sastra, Universitas Andalas, Padang, 2006), hlm. 4.

[15]"Desa Baru, Ranah Batahan, Pasaman Barat," dalam *Wikipedia Bahasa Indonesia*, diakses 6 Agustus 2026.

[16]Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan* (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hlm. 162, mengutip Majalah Minangkabau No. 1 Tahun ke-5 (1935), yang mencatat bahwa sejak zaman kolonial Belanda, Pasaman Barat telah banyak didatangi transmigran, dan pada tahun 1935 orang Jawa telah sampai di Desa Baru, sebuah wilayah kolonisasi di Pasaman, untuk membuka hutan sebagai lahan pertanian.

yang menyebut tahun 1935 sebagai tahun kedatangan mereka memperkuat keabsahan periodisasi awal penelitian ini.

Kekhasan yang menjadikan Nagari Desa Baru menarik untuk dikaji secara historis terletak pada keberagaman etnisnya. Berbeda dari kebanyakan wilayah Nagari lain di Sumatera Barat yang penduduknya didominasi oleh etnis Minangkabau dengan struktur kepemimpinan adat yang mapan, di Nagari Desa Baru justru etnis Jawa tumbuh menjadi kelompok mayoritas, melampaui jumlah penduduk etnis Mandailing dan Minangkabau yang juga bermukim di kawasan tersebut. Struktur demografis semacam ini kemudian berimplikasi langsung pada pola kepemimpinan lokal: jabatan-jabatan kepemimpinan strategis di nagari, termasuk kedudukan sebagai Wali Nagari, sejak awal telah dipegang oleh tokoh-tokoh dari kalangan etnis Jawa.[17]

Kondisi ini menjadi lebih menarik apabila dikaitkan dengan struktur adat Minangkabau, yang secara tradisional menempatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Keanggotaan KAN tidak hanya terdiri atas para penghulu atau datuak sebagai representasi niniak mamak, tetapi juga mencakup unsur alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan parik paga sesuai dengan adat salingka nagari. Para penghulu tersebut yang kedudukannya diperoleh melalui hubungan genealogis dalam sistem

UIN IMAM BONJOL PADANG

[17]*Profil Nagari Desa Baru*, bagian "Legenda dan Sejarah Nagari." 2015-2020

kekerabatan matrilineal Minangkabau.[18] Namun, penelitian pendahuluan yang penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa kedudukan Ketua KAN di Nagari Desa Baru pun turut dipegang oleh tokoh dari kalangan etnis Jawa suatu kondisi yang menyimpang dari pola umum kepemimpinan adat nagari di Minangkabau, yang idealnya diisi oleh penghulu bersuku asli. Fenomena ini menandakan adanya dinamika kepemimpinan lokal yang unik, di mana struktur formal kenagarian yang berasal dari sistem adat Minangkabau justru diisi dan dijalankan oleh kelompok etnis pendatang.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah relasi antara kelompok transmigran dengan tanah ulayat, yang pada umumnya menjadi salah satu sumber konflik utama di banyak kawasan transmigrasi di Sumatera Barat. Menariknya, di Nagari Desa Baru tidak pernah tercatat adanya konflik tanah ulayat. Hal ini disebabkan tanah yang dijadikan kawasan permukiman transmigrasi telah lebih dahulu diserahkan oleh penghulu setempat pada masa kolonial, berdasarkan suatu perundingan yang menjadikan kawasan tersebut sebagai wilayah kolonisasi.[19] Dengan demikian, status tanah ulayat di Nagari Desa Baru secara praktis telah beralih fungsi sejak awal pembukaan kawasan, sehingga ketiadaan konflik

UIN IMAM BONJOL PADANG

[18]Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau* (Yogyakarta: Ombak, 2008), hlm. 12–20, mengenai kedudukan ninik mamak/penghulu dalam struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN).

[19]Eni May, "*Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa*," hlm. 6, mengutip Bulletin Kolonisatie 1941 tentang pembukaan permukiman kolonisasi di Nagari Batahan berdasarkan perundingan dengan penghulu setempat.

agraria ini turut membentuk pola relasi sosial dan politik yang khas antara penduduk pendatang dan penduduk asli di kawasan tersebut.

Dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan sistem pemerintahan lokal yang terjadi secara nasional. Sejak awal masa Orde Baru (1966), berlangsung proses resentralisasi bertahap terhadap sistem pemerintahan daerah, yang puncaknya terwujud tiga belas tahun kemudian melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa penetapan hukum yang menyeragamkan seluruh satuan pemerintahan terendah di Indonesia menjadi sistem desa, dengan tujuan utama memudahkan kontrol politik dari pemerintah pusat, meski harus mengorbankan otonomi kelembagaan adat lokal seperti nagari di Sumatera Barat, tempat jorong berubah nomenklatur menjadi dusun dan mengakibatkan peran tokoh adat mengalami pemarjinalan struktural.[20] Kebijakan ini baru terkoreksi setelah bergulirnya Reformasi, ditandai terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka kembali ruang otonomi daerah, yang di Sumatera Barat segera direspons melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang dikenal luas dengan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[20]Irhash A. Shamad, *Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah: Kepemimpinan Sumatera Barat di Masa Orde Baru* (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 2001), Bagian 3, yang menjelaskan bahwa resentralisasi pemerintahan daerah pada masa Orde Baru berlangsung bertahap sejak 1966 dan berpuncak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menyeragamkan seluruh satuan pemerintahan terendah di Indonesia demi kemudahan kontrol politik dari pusat, mengorbankan otonomi kelembagaan adat lokal seperti nagari di Sumatera Barat.

semboyan *"Baliak ka Nagari"* (Kembali ke Nagari).[21] Perubahan sistem dari nagari menjadi desa dan kembali menjadi nagari ini secara garis besar berlangsung dalam tiga babak besar sejarah politik nasional Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi yang menjadi konteks penting untuk memahami bagaimana kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru bertahan, beradaptasi, atau mengalami perubahan corak, termasuk kemungkinan munculnya resistensi terhadap perubahan tersebut, pada setiap fase pemerintahan.

Penulis memilih tahun 1954 sebagai batas awal kajian karena pada tahun tersebut gelombang transmigrasi etnis Jawa mulai ditempatkan secara intensif di Nagari Desa Baru sejalan pula dengan rujukan Eni May yang mencatat penempatan transmigran Jawa berlangsung pada rentang 1954–1956 sebagai kelanjutan dari kebijakan kolonisasi yang telah dirintis sejak masa kolonial Belanda. Adapun batas akhir kajian ditetapkan pada tahun 2000, tahun ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 merupakan penutup fase historis kepemimpinan lokal berbasis sistem desa, sebelum Nagari Desa Baru memasuki babak baru dalam era otonomi nagari.

Berdasarkan uraian di atas, kajian mengenai dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru menjadi penting untuk dilakukan, bukan semata-mata untuk merekonstruksi rangkaian peristiwa

UIN IMAM BONJOL PADANG

[21]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Perda "Baliak ka Nagari"), ditetapkan 16 Desember 2000.

kepemimpinan di kawasan tersebut, tetapi juga untuk memahami bagaimana suatu kelompok etnis pendatang dapat memperoleh dan mempertahankan posisi kepemimpinan lokal baik pada ranah pemerintahan formal maupun pada ranah kelembagaan adat dalam kurun waktu yang panjang, sejauh mana proses tersebut memicu resistensi di tengah masyarakat, serta bagaimana dinamika tersebut turut membentuk struktur sosial dan pola hubungan antaretnik di tengah masyarakat yang multietnis.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat dirumuskan dalam persoalan pokok yaitu, bagaimana *Dinamika Kepemimpinan lokal di daerah Transmigrasi nagari Desa Baru, Pasaman Barat (1954-2000)*, timbul dua pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat tahun 1954–2000?
2. Bagaimana dampak dinamika kepemimpinan lokal tersebut terhadap struktur sosial masyarakat dan hubungan antaretnik di Nagari Desa Baru tahun 1954–2000?

UIN IMAM BONJOL PADANG

Adapun agar penelitian ini terarah dan tidak mengembang kepada pembahasan lain sesuai dengan judul penelitian yang penulis tulis tentang *Dinamika Kepemimpinan Lokal di daerah Transmigrasi nagari Desa Baru Pasaman Barat (1954-2000)*, maka penulis memberikan batasan tematis

yang berfokus pada tema sosial politik. Sedangkan, Melihat ruang lingkup yang cukup luas peneliti membatasi fokus penelitian pada batasan temporal, dalam penelitian ini merujuk pada rentang waktu antara tahun 1954 hingga 2000. Tahun 1954 dipilih sebagai batas awal karena merupakan periode awal masuknya program transmigrasi ke Nagari Desa Baru yang menjadi titik mula terbentuknya masyarakat multietnis serta pola kepemimpinan lokal di wilayah ini, sebagai kelanjutan dari kebijakan kolonisasi yang telah dirintis sejak masa kolonial Belanda. Adapun tahun 2000 dipilih sebagai batas akhir karena menandai berakhirnya fase pemerintahan sistem desa dan dikukuhkannya kembali sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, sehingga menjadi penutup yang tepat bagi satu babak sejarah kepemimpinan lokal sebelum memasuki era otonomi nagari yang baru.

Batasan spasial merupakan batasan wilayah yang ditetapkan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai salah satu nagari yang terbentuk dari proses transmigrasi dengan komposisi penduduk multietnis, meliputi etnis Jawa, Mandailing, dan Minangkabau.

UIN IMAM BONJOL PADANG

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Dilihat dari latar belakang dan juga rumusan Masalah terkait Dinamika Kepemimpinan Lokal di daerah Transmigrasi Desa Baru Pasaman Barat, maka yang menjadi tujuan penelitian ialah;

1. Mendeskripsikan dan menganalisis dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat tahun 1954–2000, mencakup proses terbentuknya kepemimpinan pada masa awal transmigrasi, pergantian kepemimpinan pada setiap fase sistem pemerintahan, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta ada tidaknya resistensi terhadap dominasi kepemimpinan etnis pendatang.
2. Menganalisis dampak dinamika kepemimpinan lokal tersebut terhadap struktur sosial masyarakat dan hubungan antaretnik di Nagari Desa Baru tahun 1954–2000, khususnya dalam kaitannya dengan relasi antara etnis Jawa, Mandailing, dan Minangkabau serta status penguasaan tanah ulayat di wilayah tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu kegunaan secara akademis dan praktis. Kegunaan secara akademis tentunya dapat memperkaya khazanah historiografi lokal mengenai kepemimpinan di daerah transmigrasi, sekaligus memberikan gambaran alternatif dari pola umum yang selama ini dipahami mengenai relasi kepemimpinan adat dan etnisitas di Sumatera Barat, terutama di konteks Pasaman Barat yang selama ini relatif masih terbatas dibandingkan daerah

transmigrasi lain. Dan adapun kegunaan secara praktis bermanfaat Bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan kepemimpinan yang inklusif, yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok etnis secara adil. Bagi tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, penelitian ini dapat menjadi cermin untuk melihat sejauh mana pola kepemimpinan yang ada telah mendorong keharmonisan, integrasi, dan kerja sama antaretnik atau justru memelihara potensi konflik laten. Bagi masyarakat nagari Desa Baru, penelitian ini diharapkan mampu memahami kesadaran akan pentingnya hubungan antar etnik yang saling menghargai dan mengelola perbedaan secara damai. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pijakan awal untuk penelitian lanjutan mengenai transmigrasi, konflik sosial, dan kepemimpinan lokal di wilayah lain. tentunya penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman pada penelitian selanjutnya yang mengekspolarasi tentang transmigrasi jawa di Desa Baru dalam konteks pembahasan yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan manambah pemahaman sehingga memperdalam literatur kepustakaan di sumatera Barat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

D. Penjelasan judul

Untuk dapat dipahami secara detail penjelasan judul Dinamika Kepemimpinan Lokal di daerah Transmigrasi Desa Baru Pasaman Barat, maka penulis merasa perlu menjelaskan bagaimana pokok yang terdapat

dalam judul diantaranya sebagai berikut: Dinamika berarti gerak atau perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu keadaan, sehingga menimbulkan pergeseran, penyesuaian, maupun perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam konteks penelitian ini, dinamika merujuk pada proses perubahan, pergantian, dan penyesuaian yang terjadi dalam kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru sepanjang tahun 1954–2000, baik yang disebabkan oleh faktor internal masyarakat maupun oleh perubahan kebijakan pemerintahan dari luar.

Kepemimpinan lokal adalah kedudukan dan peran seseorang atau sekelompok tokoh dalam memimpin, mengatur, dan mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat di suatu wilayah tertentu, baik dalam kapasitas formal (seperti wali nagari atau kepala desa) maupun kapasitas adat (seperti pemangku Kerapatan Adat Nagari/KAN). Dalam penelitian ini, kepemimpinan lokal yang dimaksud mencakup kepemimpinan formal administratif maupun kepemimpinan adat yang berlaku di Nagari Desa Baru.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Daerah transmigrasi adalah wilayah yang menjadi lokasi penempatan penduduk yang dipindahkan dari daerah asal yang padat penduduk ke daerah baru yang masih jarang penduduknya, melalui program transmigrasi yang dijalankan pemerintah, baik pada masa kolonial (dikenal dengan istilah kolonisasi) maupun pada masa pascakemerdekaan. Menurut Joan Hardjono, pengertian transmigrasi merujuk pada program-program pemerintah yang dilaksanakan dalam

rangka pemecahan masalah kepadatan penduduk, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang. Sedangkan menurut kamus besar bahasa inggris tidak ada istilah khusus transmigrasi, yang ada migrasi (migration) yang atinya perpindahan sesorang dari suatu negara untuk menetap. Dalam penelitian ini, daerah transmigrasi yang dimaksud adalah Nagari Desa Baru, yang dibuka sebagai kawasan penempatan transmigran asal Jawa.

Desa Baru merupakan sebuah Nagari yang berada di kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk dari proses transmigrasi dan dihuni oleh masyarakat multietnis, yaitu etnis Jawa, Mandailing, dan Minangkabau. Nagari Desa Baru menjadi objek utama (locus) dalam penelitian ini. Nagari Desa Baru memiliki empat jorong yaitu; Jorong Dadimulyo, Mulyorejo Timur, Mulyorejo Barat, Sepakat Madani, Sidomulyo.

Kecamatan Ranah Batahan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Mandailing Natal, dan menjadi wilayah administratif tempat Nagari Desa Baru berada. Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi cakupan wilayah administratif dari lokasi penelitian ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rentang tahun 1954 hingga 2000 merupakan batasan temporal (kurun waktu) penelitian ini. Tahun 1954 dipilih sebagai batas awal karena merupakan periode dibukanya Nagari Desa Baru sebagai kawasan transmigrasi yang menjadi titik mula terbentuknya pola kepemimpinan lokal di wilayah ini. Tahun 2000 dipilih sebagai batas akhir karena menandai berakhirnya fase pemerintahan sistem desa dan dikukuhkannya kembali sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000.

Berdasarkan dari penjelasan dari istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan merupakan suatu kajian sejarah mengenai proses perubahan dan perkembangan kepemimpinan lokal, baik formal maupun adat, yang terjadi di Nagari Desa Baru, sebuah nagari yang terbentuk dari daerah transmigrasi di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, sepanjang tahun 1954 hingga 2000, beserta dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat dan hubungan antaretnik di wilayah tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai Kepemimpinan Lokal dan transmigrasi di Kabupaten Pasaman Barat bukanlah merupakan topik yang sama sekali baru. Peneliti sebelumnya telah menyinggung permasalahan ini dalam menyangkut sudut pandang yang berbeda tentunya, Eni May, dalam laporan penelitiannya berjudul Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa, mengupas kondisi umum masyarakat transmigran di tiga desa di

Kabupaten Pasaman, termasuk Desa Baru, dengan fokus pada aspek sosial-ekonomi dan sejarah pembukaan kawasan kolonisasi.[22] Sementara itu, Nelly Indrayani dan Supian Ramli mengangkat persoalan transmigrasi dari sudut pandang keagamaan dalam kajian Transmigrasi dan Kristenisasi di Pasaman.[23]

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Elsa Mawaddah dan Suriani yang berjudul Kehidupan sosial transmigrasi Jawa di pemukiman baru II kenegarian parit kabupaten Pasaman Barat tahun 1993-1994, dalam jurnal transformasi pendidikan dan pembelajaran yang mengkaji tentang masuknya transmigran Jawa ke Pemukiman Baru II tahun 1993. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kehidupan masyarakat transmigran Jawa dengan penduduk lokal di Pemukiman Baru II Pasaman Barat tahun 1993-1994. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah yaitu tahap heuristik, yang mencakup pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmigran Jawa yang datang ke Pemukiman Baru II adalah orang-orang yang berasal dari 3 Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dari Kabupaten yang berbeda.[24]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[22] Eni May, "*Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa: Studi Kasus di Desa Tongar, Koja dan Desa Baru Pasaman Sumatera Barat"* (Laporan Penelitian, Universitas Andalas, Padang, 2006), hlm. 2.

[23]Nelly Indrayani dan Supian Ramli, "Transmigrasi dan Kristenisasi di Pasaman," *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. XII (2023), hlm. 94.

[24] Elsa Mawaddah dan Suriani, Kehidupan sosial transmigrasi Jawa di pemukiman baru II kenegarian parit kabupaten Pasaman Barat tahun 1993-1994. *Jurnal transformasi pendidikan dan pembelajaran,* Vol. 9, No.4, (November 2025), hlm 40

Adapun yang menjadi alasan para transmigran Jawa mangikuti program transmigrasi karena ingin merubah keadaan ekonomi dan kehidupan mereka dari yang sebelumnya di Pulau Jawa. Selain itu pada awal kedatangan mereka mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan baru dengan penduduk lokal.

Penelitian sebelumnya ditulis oleh Dzaki Setiabasith, dengan judul Pola Migrasi Intergenerasi Transmigran Jawa di Lampung: Analisis Karakteristik dan Perkembangan Kehidupan, dalam journal of indonesian rural and regional goverment yang mengkaji tentang menganalisis pola migrasi yang terbentuk secara intergenerasi transmigran Jawa di Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam terhadap 16 informan dari transmigran generasi kedua hingga keempat. Hasil penelitian menunjukkan pola migrasi yang terbentuk secara intergenerasi memiliki kecenderungan "kembali ke Jawa". Pola ini dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesempatan kerja di Lampung, serta faktor penarik berupa kualitas pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih baik di Jawa. Perkembangan sosial dan ekonomi secara intergenerasi membuat dorongan terhadap migrasi semakin tinggi, didukung dengan karakteristik daerah tujuan yang lebih menjanjikan.[25] Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah dalam program transmigrasi agar

UIN IMAM BONJOL PADANG

[25] Dzaki Setiabasith, Pola Migrasi Intergenerasi Transmigran Jawa di Lampung: Analisis Karakteristik dan Perkembangan Kehidupan. *Journal of indonesian rural and regional goverment*, Vol. 9, No. 2, (2025), hlm 5-7 ISSN Online: 2829-0798 . ISSN Cetak: 2580-9342

dapat memaksimalkan potensi transmigrasi wilayah yang berkelanjutan hingga intergenerasi.

Sara Kurniasari dalam skripsinya yang berjudul adaptasi mayarakat transmigrasi jawa terhadap kebudayaan jambi di desa wanareja rimbo ulu tebo 1978-1990 membahas bagaimana awal mula transmigrasi di Desa Wanareja Rimbo Ulu Tebo Jambi 1978-1990, bagaimana upaya masyarakat transmigrasi Jawa berdaptasi terhadap kebudayaan Jambi di Desa Wanareja Rimbo Ulu Tebo Jambi 1978-1990, dan bagaimana kontribusi masyarakat transmigrasi Jawa terhadap kebudayaan Jambi di Desa Wanareja Rimbo Ulu Tebo Jambi 1978-1990 dengan menggunakan metode penelitian Historis yang diawali dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama awal mula transmigrasi di Desa Wanareja yang disebabkan oleh faktor pemerintah dan faktor kondisi masyarakat, Kedua terdapat proses upaya beradaptasi terhadap kebudayaan Jambi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan melakukan empat tahapan yaitu Komunikasi, Pencapaian Tujuan (Goal Attaimenment), Integrasi dan Lesensi,[26] Ketiga hasil kontribusi masyarakat transmigrais Jawa terhadap kebudayaan Jambi berupa alkulturasi kebudayaan antara kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Jambi yaitu penggunaan irama Melayu pada pembacaan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[26] Sara Kurniasari, Adaptasi mayarakat transmigrasi jawa terhadap kebudayaan jambi di desa wanareja rimbo ulu tebo 1978-1990. *Skripsi*, universitas Jambi, 2024, hlm. 6

Berzanji, penambahan kosa kata Gori dan penamaan Desa Wanareja yang merupakan kata dari bahasa Jawa.

Penelitian yang ditulis oleh Susetyo dkk, dengan judulnya "Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung, dalam Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang mengkaji tentang meratakan pembangunan dan mengurangi kepadatan penduduk di pulau-pulau padat seperti Jawa. Tujuan penelitian adalah menggambarkan perkembangan program transmigrasi sejak era kolonial hingga kontemporer, serta mengidentifikasi capaian dan tantangan dalam integrasi sosial, dampak lingkungan, dan pengembangan infrastruktur di wilayah transmigrasi. Metode yang digunakan adalah sosio-legal yang memfokuskan pengkajian terhadap suatu permasalahan pada pelaksanaan hukum yang ada di keseharian masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi lapangan di Provinsi Lampung pada tahun 2024.[27] Temuan dari penelitian ini adalah transmigrasi di Provinsi Lampung telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak dimulainya program tersebut. Bahkan, provinsi Lampung sudah mulai bergeser dari provinsi penerima transmigrasi menjadi pengirim transmigrasi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mailiza Hidayati, dalam skripsinya yang diterbitkan Universitas Sriwijaya yang berjudul

UIN IMAM BONJOL PADANG

[27]Susetyo dkk,"Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 25: No. 2, Article 1. DOI: https://doi.org/ 10.7454 / jurna lkessos.v25i2.1034 Available at

"Kehidupan masyarakat transmigran suku jawa di desa surya adi kecamatan mesuji kabupaten ogan komering ilir tahun 1975-2005". Peneliti mengkaji rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat Transmigran suku Jawa di Desa Surya Adi Tahun 1975-2005 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Transmigran Suku Jawa di Desa Surya Adi. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat Transmigran Suku Jawa di Desa Surya Adi tahun 1975-2005. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pembukaan Desa Surya Adi dilakukan oleh Masyarakat Transmigran Suku Jawa pada tahun 1975 melalui transmigrasi lokal.[28] Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan persamaannya mengkaji masalah transmigrasi.

Nyata Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul peran transmigrasi etnis jawa dalam mengembangkan pendidikan di desa kotaraya kecamatan mepanga kabupaten parigi mautong" Penelitian ini membahas tiga Permasalahan yaitu Bagaimana Proses Kedatangan Transmigran Etnis Jawa di Desa Kotaraya, Bagaimana peran Orang Jawa dalam mengembangkan Pendidikan di Desa Kotaraya, Mengapa Orang Jawa

UIN IMAM BONJOL PADANG

[28] Mailiza Hidayati ,Kehidupan masyarakat transmigran suku jawa di desa surya adi kecamatan mesuji kabupaten ogan komering ilir tahun 1975-2005. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 5

menyukai bekerja dibidang Pendidikan di Desa Kotaraya. Penelitian ini bertujuan Menjelaskan Asal-usul, Proses, hingga penempatan obyek Transmigrasi Kotaraya, Mendeskripsikan peran Transmigran Etnis Jawa dalam mengembangkan Pendidikan di Desa Kotaraya, Menganalisis pekerja Orang Jawa di Kotaraya dan hubungan dengan pendidikan di Kotaraya. Pertanyaan penelitian ini menggunakan metodologi sejarah. Analisis hasil penelitian menunjukan bahwa Proses kedatangan Transmigran di Desa Kotaraya yaitu dengan mendaftar ke petugas transmigrasi dan di kantor transmigrasi untuk didaftar sebagai warga yang mengikuti program transmigrasi.[29] Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan di desa kotaraya kecamatan mepanga kabupaten parigi mautong. Sedangkan persamaannya mengkaji masalah transmigrasi.

Perubahan pola kehidupan masyarakat transmigran jawa di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo 1976-2018" yang di tulis oleh Nelly Indrayani dan Ahmad Khoirul Na'im dalam jejak : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi yang mengkaji tentang Transmigrasi bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Jawa telah dimulai sejak masa Kolonial. Metode yang digunakan dalam kajian ini yakni metode historis, dimulai dari heuristik, kritik sumber, intepretasi dan historiografi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa

UIN IMAM BONJOL PADANG

[29] Nyata Wahyuni, peran transmigrasi etnis jawa dalam mengembangkan pendidikan di desa kotaraya kecamatan mepanga kabupaten parigi mautong. *Skripsi*, Universitas Tadulako, 2021, hlm. 1

transmigrasi masyarakat Jawa di desa Pulung Rejo bermula dari pembangunan waduk gajah mungkur tahun 1976. Hal ini berdampak pengadaaan transmigrasi pemerintah Bedol Desa. Dinamika pola kehidupan masyarakat terlihat kemampuan produktivitas dan kemandirian masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat transmigrasi Jawa tetapi juga masyarakat lokal Desa Pulung Rejo. Hal ini memperlihatkan integritas dan sinergitas wilayah pemukiman transmigrasi Pulung Rejo, sehingga sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan tumbuh dan berkembang.[30] Penelitian ini menekankan tentang tujuan dari transmigrasi dalam menigkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi Di Era 1950an yang ditulis oleh Aan Budianto dalam Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah yang membahas tentang ketegangan sosial di Lampung pada tahun 1950an. Tujuan penelitian ini guna mencari jawaban mengenai permasalahan gejolak sosial di Lampung tersebut, dilakukan kajian sejarah kritis dengan mengumpulkan berbagai macam sumber seperti arsip-arsip berbentuk koran, foto, jurnal dan laporan pemerintah. Hasil analisis dari sumber-sumber mengenai kajian ini dapat disimpulkan bahwa faktor utama munculnya gejolak sosial penolakan program transmigrasi di Lampung adalah semakin padatnya wilayah Lampung yang membuat ruang gerak penduduka asli suku Lampung

UIN IMAM BONJOL PADANG

[30] Nelly Indrayani dan Ahmad Khoirul Na'im, "Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Transmigran Jawa di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo 1976–2015," *Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah,* Vol. 1, no. 2 (Desember 2021): hlm 43–51.

terdesak. Hal ini diperparah oleh kebijakan dari pemerintah yang terlalu memprioritaskan para pendatang. Pendatang dianggap kurang mampu dan butuh bantuan adaptasi sehingga pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan pendatang, dan bahkan merampas hak-hak masyarakat adat. Salah satu kebijakan yang dianggap tidak adil adalah penggunaan tanah adat sebagai daerah penempatan trasnmigran yang melewati batas.[31]

Penelitian yang juga dilakukan oleh Yudhi Zuriah Wirya Purba dan Wardi Saleh yang berjudul Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian di dalam Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI), dengan tema transmigrasi sebagai upaya pertanian dan pengembangan wilayah, dengan fokus pada reorientasi program transmigrasi di era desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk Membahas pelaksanaan program transmigrasi untuk pemerataan pengembangan, tantangan sentralistik vs. desentralisasi, integrasi kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitar (fisik-spasial, sosial, ekonomi, budaya), pengembangan konsep baru dengan indikator komprehensif (fisik, ekonomi, modal sosial, lingkungan), serta mengatasi stigma negatif yang memicu pengembangan di luar Pulau Jawa. Tujuan utama adalah reorientasi transmigrasi agar terintegrasi secara fungsional dan berkelanjutan. Hasil Pemilihan konsep dan strategi baru pengembangan kawasan transmigrasi dengan indikator

UIN IMAM BONJOL PADANG

[31] Aan Budianto, "Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi di Era 1950," *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah,* Vol. 20, no. 1 (Maret 2020): hlm. 18.

komprehensif. Diidentifikasi tiga kendala utama: struktural (lemah organisasi dan sinkronisasi), substansial (anggaran terbatas meski mendukung pembangunan nasional), serta teknis operasional (pemilihan lokasi kurang tepat, kurangnya integrasi antar-sektor).[32]

F. Metode penelitian

Dalam melakukan Penelitian ini penulis mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi yang di ambil. Metode yang digunakan penulis ialah metode penelitian sejarah, Metode ini merupakan langkah yang digunakan oleh sejarawan dalam memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Menurut webster metode merupakan cara atau prosedur yang bersifat sistematis, sementara itu Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau manusia. Tujuannya ialah untuk merekonstruksi kembali peristiwa masa lampau secara sistematis dan obyektif. Tujuan ini bisa dicapai dengan menggunakan metode sejarah.[33] Selanjutnya menurut Gilbert J. Garraghan metode sejarah diartikan sebagai "seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis (umumnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

[32] Yudhi Zuriah Wirya Purba dan Wardi Saleh yang berjudul Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian di dalam *Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI),* Volume. 1, Nomor. 1, (Edisi Februari 2023), hlm 71 P.ISSN. 0000.0000, E-ISSN. 0000.0000

[33] Nina Herlina, *Metode Sejarah,* Satya Historika: Bandung, Juli 2020. hlm 1, ISBN 978-602-7859-14-2

dalam bentuk tertulis) hasil yang dicapai".[34] Sementara itu, menurut Louis Gottschalk yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif tentang masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah). Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi (yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah) sejarawan berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia.[35] Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

1. Heuristik

   Heuristik merupakan suatu pendekatan atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber atau data sejarah. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *"heuriskein,"* yang berarti "menemukan". Heuristik dapat diartikan sebagai tahap pencarian, penemuan, dan pengumpulan sumber-sumber dengan berbagai cara dan dalam berbagai bentuk untuk memahami peristiwa atau kejadian sejarah yang relevan.[36] Sementara Menurut Notosusanto dkk., heuristik diartikan sebagai aktivitas eksplorasi sumber, pencarian, serta pengumpulan bahan yang akan diteliti, baik berupa

UIN IMAM BONJOL PADANG

[34] Vanni Octavania, *Jerman di Bawah Pemerintahan Adolf Hitler (Kajian Historis Tentang Gerakan Oposisi Terhadap Pemerintahan Adolf Hitler pada Tahun 1933-1945). Skripsi* S-1, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2015, Bab III: Metode Penelitian, hlm. 50

[35]Een Herdiani, Metode sejarah dalam penelitian tari, *Jurnal Ilmiah Seni Makalangan*,Vol.3, No. 2, 2016, hlm 35

[36] Laksono, Anton Dwi. *Apa Itu: Sejarah, Pengertian, Ruang Lingkup, Metode, dan Penelitian.* Drewati Press, 2018 hlm 94 ISBN 978-602-5705-05-2. E-ISBN 978-623-706-525-X.

objek fisik maupun sumber yang diperoleh dari lokasi penelitian dan sumber lisan.[37] Menurut G.J Renier Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum.[38] Heuristik juga dikatakan sebagai proses keterampilan dalam menemukan sumber dan menjadi tahapan awal dalam metode penelitian sejarah.

Dalam melakukan proses penelusuran sumber data untuk penelitian ini, peneliti melakukan Studi kepustakaan *(library research)* serta penelitian di lapangan *(field research).* Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dari literatur, seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya. Sebaliknya, penelitian di lapangan melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau populasi yang diteliti.[39] Metode ini menggunakan teknik wawancara langsung untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diakses melalui sumber tertulis. Diharapkan dapat diperoleh sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer merujuk pada informasi yang berasal langsung dari para pelaku sejarah atau saksi mata.[40] Dalam penelitian ini, sumber primer terdiri dari sumber lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara

UIN IMAM BONJOL PADANG

[37] Louis. *Mengerti Sejarah*. *Terjemahan Nugroho Notosusanto.* Jakarta: UI Press, 1986. hlm. 18.

[38] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam,* (Ombak, Yogyakarta, 2011) hlm 104

[39] Sayono Joko, *Langkah-Langkah Heuristik Dalam Konteks Metode Sejarah Di Era Digital*, Sejarah dan Budaya, (2021), hlm. 371.

[40] Nanda, Salsabila. 5 Tahapan Penelitian Sejarah Menurut Ahli dan Contohnya. *Ruangguru*, 10 Okt. 2024.

dengan individu yang terlibat atau menyaksikan peristiwa tersebut, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, mantan kepala Desa maupun Wali Nagari yang menjabat, serta Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Desa Baru. Wawancara sejarah lisan digunakan untuk melengkapi kekosongan sumber tertulis, khususnya terkait proses awal pembukaan kawasan transmigrasi dan pergantian kepemimpinan lokal yang tidak seluruhnya terdokumentasi secara tertulis.[41]

Dalam penelitian ini dapat dengan menggunakan pendekatan teori positivisme Auguste Comte dalam menganalisis dinamika perubahan masyarakat melalui wawancara mendalam. Sebagaimana interaksi individu-kelompok di tengah transformasi lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi perubahan sosial yang sistematis, menghubungkan observasi empiris dan wawancara dengan hukum perkembangan sosial Comte.[42] Sementara sumber tertulis yaitu semua keterangan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat fakta sejarah secara jelas, sumber ini dapat ditemukan dibatu, kayu, kertas (dokumen) dan dinding gua, dalam penelitian skripsi ini penulis mendapat sumber tertulis berupa buku profil nagari yang memuat lengkap baik dari sejarah dan juga struktur kepemimpinan dari nagari

UIN IMAM BONJOL PADANG

[41]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 74–75, mengenai penggunaan sumber lisan dan wawancara sebagai pelengkap sumber tertulis dalam penelitian sejarah lokal.

[42] Auguste Comte, *Cours de Philosophie Positive* (1830-1842), seperti dirujuk dalam Bahrein T. Sugihen, Sosiologi *Pedesaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 51

desa baru mulai dari fase nagari berubah ke desa hingga kembali ke nagari lagi. Sementara itu, Sumber sekunder adalah informasi yang disampaikan oleh pihak yang bukan pelaku sejarah atau saksi mata yang mengalami peristiwa tersebut. Pengumpulan sumber sekunder dapat dilakukan melalui majalah, buku-buku, jurnal, skripsi, website dan hasil penelitian dari orang lain yang memiliki tema yang sama.[43]Adapun sumber sekunder pada penulisan skripsi ini berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan skripsi terdahulu yang relevan dengan topik kepemimpinan nagari, transmigrasi, dan hubungan antaretnik di Sumatera Barat.

2. Kritik Sumber

Setelah semua sumber terkumpul pada tahapan heuristik dimana buku-buku yang relevan dengan pembahasan dan juga temuan yang ada dilapangan, langkah selanjutnya adalah kritik sumber sebagai pengujian kritis untuk memastikan keabsahan sumber.[44] Tahap ini bertujuan untuk menilai keakuratan dan keaslian sumber sejarah melalui analisis kritik internal dan eksternal. Kritik terhadap sumber yang diperoleh sangat penting sebagai langkah dalam mengetahui kebenaran suatu sumber, agar dapat dipertanggung jawabkan. Kritik internal menilai keaslian dan eksistensi sumber dari isi, baik sumber tertulis maupun lisan untuk melihat apakah informasi

UIN IMAM BONJOL PADANG

[43] Tarjul Arifin, *Metodologi Penelitian Sejarah,* Bandung, Pustaka Setia, 2014. Hlm 95

[44] Suhartono, Pranoto, W. *Teori dan Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. ISBN 978-979-756-580-0. Hlm 35

didalamnya sesuai fakta sejarah serta untuk menguji kepercayaan informasi dari satu sumber.[45] Dalam mengkritik sumber data, penulis membandingkan sumber-sumber lisan, tertulis, benda dan visual yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik. Untuk sumber tertulis, perbandingan dilakukan dengan karya sebelum dan sesudahnya, sementara data lisan divalidasi melalui wawancara masyarakat transmigran, ketua KAN, Mantan kepala Desa, serta mendukungnya dengan saksi terkait. Setelah itu, isi dari sumber tertulis dan lisan dibandingkan.

Kritik internal menyelidiki keaslian fisik sumber terkait masyarakat transmigrasi di Desa Baru. Sumber yang digunakan meliputi buku, serta jurnal dan artikel. Untuk memastikan sumber yang digunakan otentik dan bukan hasil rekayasa. Kritik external juga menguji informasi berdasarkan usia dan posisi narasumber dalam peristiwa tersebut.

3. Sintesis

Tahap selanjutnya adalah interprestasi atau yang dikenal dengan nama sintesis, maksud dari keduanya sama yaitu proses dimana fakta-fakta yang telah didapat setelah melakukan kritik sumber disusun berdasarkan keterkaita-n sumber satu sama lain secara logis, sehingga membentuk kerangka sejarah.[46] Tentunya mengaitkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[45] *Ibid,* 2018 Hlm. 106

[46] Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 101-102.

fakta-fakta yang telah diperoleh dengan informasi lainnya, menggunakan analisis interaktif.[47] Analisis interaktif diterapkan setelah data terkumpul untuk membandingkan dan menentukan data mana yang akan digunakan serta mana yang tidak relevan. Setelah melalui proses analisis tersebut, tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan.

4. Historiografi

Historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Historia dan grafein. Historia berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik, sedangkan grafein berarti gambaran lukisan tulisan atau uraian. Tahapan penulisan merupakan tahap yang terakhir dalam metode penelitian; setelah ditemukan fakta-fakta penelitian kemudian fakta tersebut dituangkan dan disajikan dalam pernyataan tertulis. Penulisan ini dilakukan agar fakta yang telah didapatkan bisa dirangkai, disusun, dan disatukan dalam suatu karya ilmiah secara sistematis.

UIN IMAM BONJOL PADANG

G. Sistematika Penulisan

Skripsi berjudul Dinamika Kepemimpinan Lokal di daerah Transmigrasi Nagari Desa Baru Pasaman Barat, Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian ini, penulis menyusun skripsi ini ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut.

[47] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 103.

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan alasan pemilihan topik penelitian, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II MONOGRAFI NAGARI DESA BARU, PASAMAN BARAT, berisi gambaran umum wilayah penelitian, mencakup letak geografis dan sejarah terbentuknya Nagari Desa Baru, kondisi sosial dan keagamaan masyarakat, serta kondisi pendidikan, budaya, dan ekonomi masyarakat Nagari Desa Baru. Bab ini menjadi pijakan kontekstual sebelum masuk ke pembahasan inti pada bab berikutnya.

BAB III PEMBAHASAN, merupakan inti dari penelitian ini yang menjawab kedua rumusan masalah, berisi analisis mengenai dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru sejak masa awal transmigrasi hingga tahun 2000, mencakup proses terbentuknya kepemimpinan, perubahan kepemimpinan pada setiap fase sistem pemerintahan (nagari, desa, dan kembali ke nagari), ada-tidaknya resistensi terhadap dominasi etnis pendatang, serta dampak dinamika tersebut terhadap struktur sosial dan hubungan antaretnik.

BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan yang menjawab secara ringkas kedua rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan baik bagi pengembangan penelitian akademik selanjutnya maupun bagi masyarakat dan pemerintah Nagari Desa baru.

UIN IMAM BONJOL PADANG